

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang mana sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 27 jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD-nya. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya

penambahan 4 jenis pajak, diantaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Vina.dkk, 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen, et all (2001) dan Robert (2002), yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010). Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir (Andreas dan Firma, 2013).

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam PAD. Retribusi daerah ialah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi jenis usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah

potong hewan, sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Sidik, 2002).

Alasan peneliti memilih Kota Tasikmalaya sebagai objek penelitian dikarenakan Kota Tasikmalaya memiliki beragam budaya dan ciri khas tersendiri. Hal inilah yang menjadikan Kota Tasikmalaya memiliki cukup banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang salah satunya bersumber dari sektor perdagangan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah. Selain itu Kota Tasikmalaya sendiri sedang dalam proses perkembangan besar – besaran, terbukti banyak investor yang menanamkan modal sahamnya di Kota Tasikmalaya, baik dari sektor perhotelan, restoran maupun tempat wisata. Selain itu peran pemerintah sendiri guna mengembangkan Kota tasikmalaya dengan harapan meningkatkan segala aspek pengembangan daerah, sedang dilakukanya perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum secara gencar-gencaran di titik-titik jalan yang dinilai sebagaai wajah utama Kota Tasikmalaya. Dapat kita lihat sendiri pemerintah sedang giat-giatnya melakukan perbaikan infrastruktur di sepanjang jalan Cihideung sampai akhir sepanjang jalan Padayungan yang dinilai sebagai jalan utama yang paling

ramai dilewati warga Kota Tasikmalaya yang sangat berpotensi sebagai daerah strategis dalam aspek perekonomiannya.

Selain itu setiap tahunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Tasikmalaya terbukti terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan bahkan melebihi target tahunan (Radar Tasikmalaya). Hal tersebut dapat dibuktikan dilihat dari data realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Ribuan Rupiah), 2009-2015 khususnya Kota Tasikmalaya.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Ribuan Rupiah), 2009-2015

Wilayah Provinsi [1]	Penerimaan						
	2009 [2]	2010 [3]	2011 [4]	2012 [5]	2013 [6]	2014 [7]	2015 *) [8]
1. Bogor	2,178,137,508	2,511,474,972	3,451,755,115	3,974,405,353	4,572,332,367	5,378,094,140	5,230,638,127
2. Sukabumi	1,432,336,420	1,519,732,036	1,856,087,255	2,033,421,618	2,408,355,096	2,942,653,334	2,812,537,916
3. Cianjur	1,323,092,886	1,475,100,100	1,778,136,976	2,035,530,861	2,247,859,248	2,628,333,894	2,728,610,897
4. Bandung	1,954,420,909	2,042,977,658	2,453,416,215	2,902,414,605	3,368,043,981	4,038,777,826	3,961,557,568
5. Garut	1,594,689,277	1,695,066,201	2,066,858,426	2,329,795,383	2,741,528,022	3,150,458,861	3,178,073,133
6. Tasikmalaya	1,227,079,796	1,349,511,937	1,510,096,241	1,813,389,750	2,213,623,319	2,566,519,525	2,298,151,201
7. Ciamis	1,346,230,868	1,318,623,299	1,593,535,341	1,867,335,578	2,196,493,937	2,005,675,647	2,033,414,163
8. Kuningan	950,664,909	1,115,998,377	1,304,443,236	1,463,418,860	1,625,739,031	1,897,340,120	2,051,894,954
9. Cirebon	1,285,732,521	1,483,375,457	1,781,243,089	1,994,265,313	2,316,011,665	2,733,509,105	2,796,620,325
10. Majalengka	966,481,044	1,122,795,910	1,277,921,524	1,574,352,385	1,791,764,985	2,057,001,724	2,270,080,756
11. Sumedang	949,427,770	1,086,557,300	1,349,199,015	1,494,452,792	1,715,190,459	2,087,159,777	2,095,289,186
12. Indramayu	1,206,349,249	1,372,771,998	1,672,637,776	1,885,653,942	2,121,308,066	2,578,254,653	2,841,031,927
13. Subang	1,112,812,440	1,186,278,289	1,405,974,623	1,566,137,079	1,825,872,248	2,231,098,382	2,219,884,543
14. Purwakarta	782,025,970	848,949,139	995,275,625	1,156,857,540	1,371,139,969	1,592,267,482	1,976,923,407
15. Karawang	1,337,343,487	1,599,426,320	2,022,376,611	2,461,055,535	2,691,829,177	3,198,292,289	3,390,641,611
16. Bekasi	1,623,653,309	1,735,259,433	2,363,250,554	2,788,775,365	3,363,441,159	3,924,316,668	3,916,564,067
17. Bandung Barat	864,827,868	1,013,378,689	1,278,984,500	1,432,861,214	1,671,362,340	1,911,843,587	1,951,999,486
18. Pangandaran	-	-	-	-	-	647,938,095	1,014,850,150
19. Kota Bogor	837,416,444	899,450,951	1,141,638,164	1,334,121,611	1,574,372,009	1,757,697,382	1,827,008,274
20. Kota Sukabumi	506,568,226	565,149,869	631,194,557	732,503,789	843,683,977	996,914,566	1,004,025,195
21. Kota Bandung	2,402,466,979	2,440,168,435	3,115,296,524	3,666,693,410	4,332,088,947	4,953,940,629	5,330,912,167
22. Kota Cirebon	637,259,934	677,729,111	838,617,783	872,125,300	1,009,950,399	1,234,067,585	1,200,234,234
23. Kota Bekasi	1,476,770,000	1,582,441,085	2,220,351,557	2,678,890,730	2,962,609,186	3,480,363,128	3,662,667,813
24. Kota Depok	991,862,301	1,111,708,060	1,329,137,909	1,634,893,022	1,921,402,779	2,207,866,592	2,162,654,893
25. Kota Cimahi	592,055,089	619,489,083	721,746,718	872,552,564	975,350,197	1,117,121,948	1,096,124,399
26. Kota Tasikmalaya	709,019,452	829,347,403	915,696,937	1,061,452,088	1,365,587,674	1,595,644,027	1,604,649,868
27. Kota Banjar	362,331,529	384,144,291	489,435,484	545,085,310	620,917,336	672,708,502	632,403,535

(Sumber; BPS Jawa Barat)

Sesuai visi kepala daerah lima tahun kedepan, yaitu **“Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”**. Yang mana berdasarkan rumusan diatas maka visi pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmlaya: **“Akselerator yang Handal di Bidang Pajak Daerah”**. Maka dari itu Dispenda Kota Tasikmala memiliki misi diantaranya;

1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak.

2. Meningkatkan profesionalisma sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka untuk menunjang hal diatas diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat (Mahi, 2002). Karena dengan hal tersebut, diharapkan akan menciptakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah itu sendiri, hal tersebut didukung oleh Rizal (2011) menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah faktor ekonomi.

Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Kota Tasikmalaya memiliki beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan dan diolah dalam rangka mendongkrak penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan distribusi daerah diantaranya;

1. Penataan wajah kota dan penertiban ijin bangunan
2. Pembangunan Taman di Kota Tasikmalaya
3. Merebaknya wisata kuliner di Kota Tasikmaya
4. Penegrian Universitas Siliwangi
5. Pembangunan fasilitas perbelanjaan baru
6. Pembangunan komplek perumahan/pemukiman baru
7. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Kota Tasikmalaya

Sejalan dengan uraian diatas, penelitian yang akan digunakan oleh penulis merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Sulistyowati (2011), dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh hasil yang positif dimana secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah, DAK, DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Budianas (2011) juga telah meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Makassar). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan pengaruh yang positif antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota tersebut.
3. Eko Hardyono (2009) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif antara dana perimbangan terhadap belanja modal, namun retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Zawari Imron (2012) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan hasil positif yang signifikan antara Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Tangerang Saelatan.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis Sekarang

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
1	Diah Sulistyowati (2011) Judul: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal.	Menggunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel X_1 dan X_2 nya.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan PAD sebagai variabel Y.	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.	Dipublikasikan di https://core.ac.uk
2	Nanang Budianas (2011) Judul: Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Makassar).	Menggunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel X_1 dan X_2 nya, juga PAD sebagai variabel Y.	-	pengaruh yang positif antara Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD.	Dipublikasikan di nanangbudianas.blogspot.co.id
3	Eko Hardyono (2009) Judul : Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal.	Menggunakan retribusi daerah sebagai salah satu variabel X nya.	Tidak menggunakan pajak daerah sebagai salah satu variabelnya begitu juga PAD sebagai variabel Y nya.	Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan.	Skripsi Universitas Diponegoro eprints.undip.ac.id
4.	Zawawi Imron (2012) Judul: Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tangerang Selatan.	Menggunakan Pajak Daerah sebagai variabel X_1 dan Retribusi Daerah sebagai variabel X_2 nya, begitu juga PAD	-	pengaruh yang positif antara Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Tangerang Selatan.	Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera.http://repository.usu.ac.id/

sebagai
variabel Y.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”** (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya).

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.

3. Pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.
4. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi harapan penulis setelah melaksanakan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan, diantaranya yaitu :

1. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam menempuh skripsi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, juga memberikan suatu tambahan pengetahuan mengenai sumber pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang mana dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu daerah, PAD sangat berperan penting guna keputusan yang akan diambil pemerintah kedepan dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut, sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kesesuaian antara fakta dan teori yang ada.

2. Bagi Instansi

Hasil-hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengikuti laju

pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mendorong Kota Tasikmalaya ke arah tercapainya visi, misi dan tujuan yang lebih baik lagi.

3. Bagi Pihak Lain

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari Bulan Maret sampai dengan Bulan April 2016.

Tabel 1.2

Aktivitas	oktober 2015				Maret 2016				April 2016				Mei 2016				Juni 2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persiapan Administrasi	■	■																		
Pengajuan Judul				■																
Penulisan Bab 1,2,3					■	■	■	■												
Bimbingan dan revisi UP									■	■										
Sidang UP											■	■								
Revisi UP													■	■						
Penelitian															■	■				

